

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2024, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan ($F\text{-hitung} = 31,049$; $\text{sig.} = 0,000 < 0,05$). Secara individual, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 13,1% dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berkontribusi sebesar 28,6% dari total 43,1% variasi Belanja Daerah .
- 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan ($t\text{-hitung} = 3,046$; $\text{sig.} = 0,003 < 0,05$). Setiap peningkatan PAD sebesar 1 satuan secara rata-rata mendorong peningkatan Belanja Daerah sebesar 0,107 satuan, dengan kontribusi parsial sebesar 13,5% terhadap total variasi Belanja Daerah.
- 3) Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dengan pengaruh yang lebih dominan dibandingkan PAD ($t\text{-hitung} = 6,689$; $\text{sig.} = 0,000 < 0,05$). Secara parsial, TKDD berkontribusi sebesar 29,6% terhadap total variasi Belanja Daerah yang dijelaskan model.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak terkait:

- 1) Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah daerah hendaknya meningkatkan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan daerah, digitalisasi sistem perpajakan, serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru seperti optimalisasi pengelolaan aset daerah dan peningkatan dividen BUMD. Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan memprioritaskan belanja produktif, memperkuat sistem perencanaan dan monitoring belanja, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.
- 2) Bagi Pemerintah Pusat, pemerintah pusat disarankan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan formula alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih tepat mencerminkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah yang sebenarnya. Selain itu, perlu peningkatan alokasi dan perbaikan mekanisme Dana Insentif Daerah (DID) untuk mendorong kompetisi positif antar daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Pemerintah pusat juga perlu menyediakan program capacity building yang sistematis bagi pemerintah daerah, khususnya daerah dengan kapasitas

fiskal terbatas, melalui pelatihan teknis dan pendampingan dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja daerah.

- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya, peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian dengan menambahkan variabel moderating seperti pertumbuhan ekonomi, kualitas tata kelola pemerintahan untuk menilai bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan Belanja Daerah. Selain itu, peneliti dapat menggunakan metode analisis yang lebih advanced seperti Fixed Effect Model atau Random Effect Model untuk data panel, memperluas cakupan geografis ke beberapa provinsi untuk analisis komparatif, atau memisahkan komponen TKDD (DAU, DAK, DBH, DID, DD) untuk menganalisis pengaruh spesifik masing-masing komponen terhadap belanja daerah.